

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asal mula pertanian dunia dimulai di Asia Tenggara. Pada waktu itu kita temui berbagai sistem yang berbeda baik tingkat efisiensi teknologinya maupun tanaman yang diusahakan, seperti adanya sistem ladang, sistem tegal pekarangan, sistem sawah dan sistem perkebunan.

Sistem ladang merupakan sistem yang paling belum berkembang, hal ini disebabkan karena pengelolaan tanah minimum sekali bahkan dapat dikatakan tidak ada usaha pengolahan tanah. Sistem ini berkembang pada daerah yang penduduknya jarang dan sumber tanah yang tidak terbatas. Biasanya tanaman yang diusahakan adalah tanaman pangan.

Sistem tegal pekarangan berkembang di daerah yang kering, jauh dari sumber mata air sinambung. Sistem ini diusahakan setelah menetap lama dan tingkat pengusahaan juga rendah. Untuk tegal biasanya tenaga kurang intensif dan tenaga hewan juga jarang digunakan. Tanaman yang ditanam biasanya yang tahan kekeringan dan pohon-pohonan.

Sistem sawah merupakan teknik budidaya yang tinggi terutama dalam hal pengelolaan air dan tanah sehingga tercapai stabilitas biologi yang tinggi, kesuburan tanah yang dapat dipertahankan. Hal ini dapat dicapai dengan sistem pengairan yang sinambung dan drainase yang lambat. Sawah

merupakan potensi besar untuk produksi pangan baik padi maupun palawija. Di beberapa daerah tanaman tebu dan tembakau sangat bergantung padanya.

Sistem perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (estate) yang dulu milik swasta asing dan sekarang kebanyakan negara, berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor. Dimulai dengan bahan-bahan ekspor seperti karet, kopi, teh dan coklat yang merupakan hasil utama. Dalam taraf tertentu pengelolaan merupakan yang terbaik, akan tetapi dibandingkan dengan kemajuan di dunia berkembang masih jauh tertinggal.

Dari empat macam sistem di atas sampai sekarang yang masih sering kita temui adalah sistem persawahan. Sistem ini berkembang dan bertahan karena adanya pengolahan tanah yang baik dan adanya pengairan yang berkesinambungan.

Hal ini sesuai dengan Repelita I yang lebih menitikberatkan pada swasembada pangan. Adanya sawah maka adanya lahan pertanian yang terbatas, akan tetapi hal ini bukan merupakan suatu kendala, hal ini dikarenakan adanya pengelolaan tanah yang baik pada sistem persawahan, sehingga hasil yang didapat pun bisa menjadi maksimal. Sehingga secara tidak langsung adanya Repelita I menunjukkan peran dari lahan persawahan yang begitu penting. Untuk daerah Karesidenan Surakarta, kabupaten Klaten memang dicanangkan sebagai daerah penyangga pangan. Hal ini dapat dibuktikan bila kita melihat Kabupaten Klaten terdapat pabrik yang relatif sedikit, sangat berbeda dengan kota Solo (Surakarta), Kabupaten Boyolali,

Di beberapa daerah yang disebutkan diatas banyak berdiri pabrik pabrik dalam skala yang relatif besar. Dengan posisinya sebagai kawasan penyangga pangan maka areal persawahan di Klaten menjadi relatif lebih luas jika dibandingkan dengan areal persawahan di luar Kabupaten Klaten. Hal ini berdampak pada penggunaan air untuk irigasi yang menjadi relatif lebih besar, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah dikarenakan di Klaten terdapat banyak mata air yang mempunyai debit air yang lumayan besar, seperti mata air Ingas di daerah CokroTulung yang mempunyai debit air lebih dari 1.050 liter per detik.¹

Seiring perjalanan waktu, penambahan atau jumlah populasi penduduk tidak dapat dielakkan. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang semakin meningkat seperti kebutuhan akan adanya air bersih bagi warga atau masyarakat di kawasan perkotaan, hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat kota yang berkaitan dengan pentingnya daerah resapan serta kurang baiknya perencanaan yang berkaitan dengan tata lingkungan yang berimbas pada penyalahgunaan fungsi lahan. Contoh yang terjadi adalah banyaknya bangunan permanen yang berdiri diatas kawasan peresapan air, ironisnya hal ini terjadi tidak hanya di Klaten saja, tetapi juga di daerah-daerah lain di luar Klaten.

Melihat kenyataan ini pemerintah kabupaten Klaten tidak tinggal diam, dalam usaha pemenuhan kebutuhan air bersih Pemerintah Kabupaten Klaten membentuk Perusahaan air minum yang lebih dikenal dengan PDAM.

¹ Sub dinas pengairan DPU kab Klaten

Tugas utama dari PDAM adalah menyediakan pelayanan air bersih kepada para pelanggan serta masyarakat melalui hidrant umum, terutama bagi masyarakat perkotaan. Seperti yang kita ketahui adanya proses pengambilan kebijakan tidak mungkin menguntungkan kedua belah pihak akan tetapi pasti ada salah satu pihak yang "merasa" dirugikan. Dalam kasus berdirinya PDAM pihak-pihak yang merasa dirugikan adalah petani, hal ini dikarenakan PDAM mengambil bahan baku air bersih dari mata air Geneng sebesar 141 liter per detik². Jika melihat sebelumnya alokasi untuk pengairan atau irigasi adalah semuanya yaitu 213 liter per detik kemudian setelah berdiri PDAM alokasi air untuk irigasi berkurang drastis mencapai 141 liter per detik menjadi 72 liter per detik yang mana air sebesar itu digunakan untuk mengairi sawah sebesar 107 Ha, Disini dapat kita ketahui bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mengindikasikan bahwa PDAM merupakan perusahaan daerah yang lebih diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena PDAM adalah perusahaan yang tidak hanya menjalankan fungsi sosial tetapi juga dibebani target PAD, itu artinya PDAM juga menjadi Perusahaan yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Hal inilah yang menjadi faktor ketidakpuasan yang dialami oleh petani, dengan pengurangan air irigasi maka banyak petani yang menjerit karena sawahnya kekurangan air yang berakibat sawah menjadi kurang produktif dan masih banyak masalah lainnya yang

melakukan aksi protes ataupun keberatan kepada PDAM yang mana dari pihak petani selama ini beranggapan bahwa semenjak air diambil oleh PDAM sebesar 141 l/dt maka jatah air untuk irigasi menjadi jauh berkurang. Dengan didampingi oleh Forum komunikasi Keluarga Petani, petani yang selama ini terkesan diam kemudian melakukan aksi dengan mempertanyakan alasan yang diambil oleh PDAM sehingga pihak PDAM melakukan eksploitasi air dari mata air Geneng sebanyak 141 l/dt. Sedangkan dari pihak PDAM juga menanggapi kedatangan petani dan mengemukakan alasan yang ada yaitu pengambilan air sebesar 141 l/dt sudah melalui studi kelayakan yang dilakukan oleh pihak PDAM, hal ini tidak lantas membuat petani puas karena yang mereka ketahui selama ini PDAM mengambil air secara semena-mena, yaitu dalam melakukan pengambilan air sudah melalui ijin dari pihak-pihak yang berwenang, akan tetapi petani yang notabene adalah pengguna air yang utama malah merasa ditinggalkan. Hal inilah yang sebenarnya menjadi titik pangkal dari ketidakpuasan petani sehingga petani melakukan aksi. Sebenarnya dengan adanya alokasi air untuk pengairan sebesar 72 l/dt masih dapat dikatakan cukup, dengan syarat semua saluran yang ada berfungsi normal tanpa ada kerusakan yang berarti. Akan tetapi banyak jatah air yang ada juga dimanfaatkan oleh oknum yang ada, sehingga mereka yang punya uang bisa mendapatkan air dengan cara membeli oknum tersebut. Semuanya ini juga diperparah dengan rusaknya sebagian besar saluran irigasi sehingga

..... menjadi lebih

berkurang lagi karena saluran-saluran irigasi tidak dapat mengalirkan air sebagaimana mestinya.

Menurut PP Nomor 23 Tahun 1982 yang mengatur masalah irigasi atau jaringan irigasi pemeliharaan menjadi tanggungjawab Propinsi, akan tetapi sejak munculnya PP Nomor 77 Tahun 2001 pemeliharaan menjadi tanggungjawab perkumpulan petani pengguna air atau yang lebih dikenal dengan P3A, dengan dana patungan antara Pemerintah dengan P3A. Sedangkan kenyataan yang ada selama ini petani tidak merasa diberi tanggungjawab mengenai operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Hal inilah yang menimbulkan salah paham diantara petani dengan Sub Dinas Pengairan berkaitan dengan pemeliharaan jaringan irigasi. Sehingga petani juga hanya mendiamkan saluran irigasi yang rusak dengan konsekwensi jatah untuk pengairan menjadi berkurang.

Disini Pemerintah melalui Sub Dinas Pengairan yang berwenang atas pengelolaan semua mata air dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat khususnya kepada petani sebagai pihak yang berkompeten atas penggunaan air untuk keperluan irigasi, sehingga kerugian dikalangan petani dapat diminimalisir termasuk di dalamnya adalah menjadi fasilitator antara pihak-pihak yang bersengketa.

B. Perumusan masalah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul yaitu” **Bagaimana peran Sub Dinas Pengairan DPU kabupaten Klaten dalam menyelesaikan sengketa air antara PDAM dengan petani”?**.

C. Kerangka Teori.

1. Peranan.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, sedangkan teori peranan memiliki asumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari harapan terhadap peran yang dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga itulah yang kemudian dibentuk suatu peran, sehingga peran aktor sangat tergantung atau dugaan yang muncul.

Peranan dapat pula diartikan sebagai suatu yang terjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta dinamisasi dari seluruh posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Banyak sekali pengertian peranan yang telah dikemukakan oleh para pakar. Disini hanya ditulis dua pengertian dalam peranan.

"WS Purwodarminto" : Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya suatu hal atau peristiwa).

"Laurence Ross" : Peranan adalah dinamisasi dari status subyektif.³

Adapun yang dimaksud status adalah keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki seseorang didalam pola kelakuan timbal balik antar individu dengan kelompok di dalam masyarakat, baik kedudukan yang diwariskan maupun kedudukan yang diusahakan.⁴

Astrid S. Susanto mengemukakan bahwa peranan itu mengandung 3 hal, yaitu:⁵

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkuman peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
3. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

³ Adi purwanto, ulama dan peranannya dalam masyarakat Dalam masyarakat, Surakarta 1984 hal 7

⁴ Rafih linton dalam Drs ismangun, suatu pengantar ringkas sosiologi, Hm Mars Bandung, 1971, hal 40

2. Dinas Daerah.

Merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.⁶ Dinas daerah merupakan kewenangan desentralisasi. Disini yang dimaksud dinas kabupaten adalah Dinas Pekerjaan Umum. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum mempunyai empat Sub Dinas yaitu Sub Dinas Cipta Karya, Sub Dinas Bina Marga, Sub Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dan Sub Dinas Pengairan. Masing masing Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas yang secara struktural berada langsung dibawah Kepala Dinas. Setiap Sub Dinas mempunyai kewenangan yang berbeda beda, Sub Dinas Cipta Karya mengurus gedung gedung pemerintah, Sub Dinas Bina Marga mengurus jalan dan jembatan, Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengurus taman kota dan bertanggung jawab atas kebersihannya dan yang terakhir adalah Sub Dinas Pengairan yang mempunyai kewenangan mengurus masalah yang berkaitan dengan irigasi, termasuk didalamnya adalah bendung, bangunan air, air, saluran dan orang yang bersangkutan yaitu PNS dan perkumpulan petani pengguna air atau yang dikenal dengan P3A.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi⁷

- a). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b). pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
-

c). pembinaan terhadap unit pelaksana teknis daerah dalam lingkup tugasnya.

Dari tiga poin diatas maka Dinas selalu melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas dalam menjalankan fungsinya sehingga semua diharapkan dapat bekerja dengan maksimal.

Seiring dengan kemajuan global, lembaga dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya termasuk kemampuan SDM aparatnya. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas SDM maka semakin tinggi pula kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut.

Kinerja organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1) Responibilitas

Aspek ini diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan serta program program yang dimiliki oleh Sub Dinas. Kondisi administrasi, kebijakan dan program yang baik disini dimaksudkan dalam arti yang luas sebagai kemantapan system pekerjaan dan keahlian yang dimiliki oleh aparat. Kondisi administrasi, kebijakan dan program disini dimaksudkan adalah sebagai aturan hukum yang harus ditaati oleh aparatnya dan dilaksanakan sesuai

... adalah dituntut sebagai pelaksanaan tanggung

2) Responsivitas

Aspek ini diartikan sebagai daya tanggap karyawan terhadap kebutuhan masyarakat. Daya tanggap disini dimaksudkan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan penerapan peraturan yang benar untuk mengukur responsivitas adalah dengan semakin tinggi daya tanggap karyawan atau pegawai terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat maka akan semakin baik pula kemampuan aparat dalam melayani masyarakat.

3) Profesionalisme

Aspek ini menunjukkan pada sifat suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para aparatur Sub Dinas Pengairan sebagai komponen yang fungsi tersebut. Profesionalisme juga dapat diukur dengan tingkat pendidikan yang diperoleh dari aparatnya, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula tingkat profesionalismenya. Hal ini disebabkan pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan yang dimilikinya, profesionalisme akan selalu ditunjang oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dalam hal ini dibutuhkan

4) Akuntabilitas

Aspek ini dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban dari para aparaturnya tentang apa yang telah dilakukannya terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah pada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau memiliki kepentingan dengan Sub Dinas Pengairan khususnya. Salah satu cara untuk mengukur akuntabilitas tersebut adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi serta evaluasi dari setiap kegiatan yang sedang atau telah dilakukan oleh organisasi karena hal tersebut akan menjadi bahan koreksi bagi organisasi dalam melakukan pembenahan-pembenahan untuk meningkatkan kualitasnya.⁸

Untuk mencapai kinerja yang baik sudah seharusnya para aparatur pemerintah memberikan tanggapan atau respon yang sebaik baiknya kepada masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya sehingga masyarakat merasa diperhatikan oleh pemimpin atau atasannya.

3). Petani

Apakah Masyarakat Petani merupakan kata terjemahan yang baik untuk Peasant society? Atau bahkan "masyarakat desa" pun sama baiknya?. Redfield memperkenalkan secara lebih luas istilah peasant, antara lain dalam pencirian peasant culture, yang disebut juga tradisi kecil (rendah), dibedakan dari "tradisi agung" (tinggi), berdasarkan pendekatan kajian religi, ritual dan mitos. Scott kemudian mengkaitkannya dengan

⁸ Mosher, Frederick C, *Democracy And The Public Service*, New York, Oxford University Press, 1968 seperi dikutip oleh Pribadi, Ulung dalam Drs diktat mata kuliah *Organisasi Publik, perencanaan strategi*, Fisipol UMY

5) Sengketa

A. Pengertian Sengketa

Pada dasarnya sengketa merupakan gejala yang serba hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan dalam tradisi Marxian, sengketa merupakan prasyarat bagi terciptanya sebuah masyarakat yang diidamkan, yaitu sebuah masyarakat yang samia rata, sama rasa. Biasanya ia didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan, baik ide, faham, atau kepentingan antara kedua pihak atau lebih.

Menurut Soeryono Soekanto, pertentangan atau konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik ini terjadi akibat semakin tajamnya perbedaan yang ada, yang dipicu oleh kesadaran pribadi atau kelompok terhadap perbedaan, misalnya ciri-ciri badaniyah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola pola perilaku dan seterusnya dengan pihak lain¹².

Sementara menurut Wiess dan Becker sebab musabab atau akar-akar dari pertentangan atau konflik itu antara lain adalah:¹³

¹² Soeryono Soekanto, " *Sosiologi : Suatu Pengantar* ", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 107 seperti dikutip oleh Mardiansyah, Arrochman dalam mata kuliah negosiasi dan resolusi konflik

¹³ Leopold von Weiss dan Howard Becker, *Systematic sociology* dalam Soeryono Soekanto, ibid

1. Perbedaan antara individu –individu. Perbedaan pendirian mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang per orang tergantung pula dari pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seseorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pola pemikiran dan pola pola pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok manusia.
3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam. Ada kepentingan ekonomi, politik dan lain sebagainya.
4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang sedang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan ini menyebabkan terjadi golongan-golongan yang berbeda pendiriannya, umpamanya mengenai reorganisasi sistem nilai. Sebagaimana diketahui, perubahan sosial mengakibatkan terjadinya disorganisasi pada struktur.

B. Berbagai Tahapan dan Penyelesaian sengketa

Kecenderungan bangsa kita lebih menganggap bahwa konflik

..... dapat dihindari. Hal ini

dikarenakan kebanyakan dari kita cenderung percaya bahwa harmoni atau keselarasan antar individu atau antar kelompok berada diatas segala-galanya, sehingga dengan demikian maka organisasi ataupun individu-individu dalam organisasi cenderung menghindar ketika ada suatu potensi konflik, tanpa berusaha untuk mengelolanya. Penghindaran semacam ini memang diakui dapat efektif menghindarkan benturan pada suatu ketika. Namun potensi konflik yang tak terkelola ini justru akan menjadi bom waktu dan meledak menjadi benturan yang lebih besar dan membawa akibat yang jauh lebih parah jika tidak dikelola dengan tepat dan benar. Disinilah fungsi kepemimpinan, dimana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan langkah-langkah sesuai dengan tahapan dari konflik itu sendiri (manajemen konflik), karena walaupun sama-sama tidak diharapkan, namun konflik pasti suatu ketika akan terjadi juga.

Miftah Thoha mencatat ada dua tataran konflik, yang pertama adalah konflik antar tataran pribadi, dan yang kedua adalah konflik organisasi. Konflik antar pribadi terjadi jika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain dalam melaksanakan pekerjaan. Joe Kelly melihat bahwa dalam tahap ini, konflik dapat timbul karena: Pertama, perbedaan pandangan yang tidak bisa disatukan; kedua, tidak adanya

... ..

Dalam mengelola konflik pada tataran ini, ada tiga strategi dasar yang bisa diaplikasikan, yaitu: *lose-lose* (sama-sama merugi) di mana pihak-pihak yang bertikai sama-sama menderita kerugian, *win-lose* (kalah menang) dimana salah satu pihak yang bertikai ada yang mengalami kerugian dan pihak yang lain mengalami keuntungan, dan *win-win* (sama-sama beruntung) dimana semua pihak yang bertikai sama-sama mendapatkan kemenangan.

Yang kedua adalah konflik organisasi. Konflik organisasi sebenarnya adalah konflik antar pribadi yang mengambil tempat dalam suatu organisasi tertentu. Ada empat struktur yang seringkali menjadi tempat berlangsungnya konflik, yakni: 1. konflik hierarki, 2. konflik fungsional, 3. konflik lini-staf, 4. konflik formal-informal.

Dalam konflik organisasi seperti diatas, Louis Pondy menawarkan tiga penyelesaian sebagai berikut.¹⁴ (1) pendekatan tawar menawar (*bargaining approach*), yaitu tawar menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, (2) pendekatan birokratis, yang digunakan untuk mengatasi konflik hierarki baik baik horizontal ataupun vertikal. Strategi untuk mengatasi konflik seperti ini ialah mengganti aturan –aturan birokrasi yang impersonal yang cenderung kaku dengan cara –cara kontrol yang personal dan luwes, (3) pendekatan sistematis, yang digunakan untuk mengatasi persoalan koordinasi antar fungsi. Dua strategi utama dalam pendekatan ini

adalah mengurangi perbedaan yang mencolok dari tujuan –tujuan yang ingin dicapai antar unit – unit organisasi, dan mengurangi ketergantungan fungsional antar satuan – satuan organisasi tersebut.

Menurut Ralf Dahrendorf, ada dua macam tataran konflik. Yang pertama adalah konflik latent, dimana pertentangan untuk memenuhi kebutuhan tidak terwujud ke dalam konflik terbuka dan yang kedua adalah konflik manifest, yaitu konflik yang pertama tadi mewujud kedalam pertikaian terbuka¹⁵

Ada sejumlah syarat agar latent konflik dapat berubah menjadi manifest konflik. Menurut Dahrendorf, syarat itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. Kondisi teknis, dimana dalam kondisi itu konflik memerlukan munculnya pemimpin dan pembentukan ideologi.
2. Kondisi politik, disini konflik memerlukan tingkat kebebasan yang ada untuk pembentukan kelompok dan tindakan kelompok, dan
3. Kondisi sosial, yang mana didalamnya meliputi tingkat komunikasi antar anggota dari suatu kelompok semu.¹⁶

Sementara menurut William Hendricks, tahap tahap konflik meliputi tiga tahap, yaitu: tahap satu, konflik dalam peristiwa sehari-hari. Konflik pada tahap ini tidak begitu mengancam dan paling mudah untuk dikelola. Ciri konflik pada tahap ini adalah terjadi terus menerus, misalnya ditandai dengan perasaan jengkel terhadap rekan

¹⁵ Ralf Dahrendorf dalam Soemarto Soekanto, op cit hal 111

sekerja, teman sekantor dan sebagainya. Salah satu bentuk manajemen konflik yang efektif dalam tahap ini adalah “menghindar”. Intervensi pimpinan atau pihak ketiga cenderung belum diperlukan.

Tahap kedua, tahap tantangan. Di sini ditandai dengan sikap kalah-menang. Cara menghindar tidak lagi efektif pada tahap satu, karena di sini sudah ada upaya seseorang untuk memenangkan konflik. Oleh karena itu intervensi pimpinan mulai diperlukan.

Tahap ketiga, tahap pertentangan. Tujuan untuk menang seperti pada tahap dua disini telah berubah menjadi keinginan untuk menciderai. eskalasi konflik meningkat, bahkan pada upaa unntuk menghilangkan pihak lawan. Disini mutlak diperlukan cmpur tangan pihak luar, berupa negoisasi dan arbitrase. Disini nyaris tidak mungkin satu persoalan dapat diselesaikan dengan win-win solution, karena masing-masing pihak telah mengambil keputusan harus ada”korban” dalam konflik kali ini.

D. Definisi Konsepsional

1. Peranan

Peranan adalah langkah-langkah (rencana yang cermat) mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

2. Dinas Daerah

Merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki tanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah.

3. Petani

Adalah orang yang menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam, dan biasanya mengusahakan tanaman pangan.

4. PDAM

Adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, terutama kepada pelanggan dan bertanggung jawab kepada stakeholder serta pelanggan yang ada.

5. Konflik

Merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.

6. Peranan Sub Dinas Pengairan dalam menyelesaikan sengketa air antara PDAM dengan petani.

Adalah langkah-langkah yang dilakukan Sub Dinas Pengairan dalam usahanya menyatukan perbedaan dalam hal perebutan air antara PDAM dengan petani.

E. Definisi Operasional

Definisi ini dimaksudkan untuk memperlis konsep-konsep yang

1). Peran Sub dinas pengairan DPU dalam menyelesaikan sengketa air antara PDAM dengan petani diukur dengan:

- a. Intensitas kepala Sub Dinas Pengairan dalam mempertemukan PDAM dengan petani.
- b. Intensitas kepala Sub Dinas Pengairan dalam menawarkan alternatif penyelesaian sengketa air antara PDAM dengan petani.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Sub Dinas Pengairan dalam usahanya menyelesaikan sengketa air

2). Indikator kerja aparatur pemerintah

a. Aspek Responibilitas.

Diukur dengan:

- a.1 Kemampuan aparat dalam merealisasikan program kerja Sub Dinas Pengairan.
- a.2 Tanggung jawab aparat sub dinas pengairan terhadap disiplin kerja.

b. Aspek Responsivitas.

Diukur dengan:

- b.1 Daya tanggap aparat Sub Dinas Pengairan dalam merespon saran dan kritik dari masyarakat.
- b.2 Kemampuan aparat dalam membina dan menyelenggarakan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat

c.1 Keahlian yang dimiliki aparat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sub Dinas Pengairan.

c.2 Tingkat pengetahuan atau pengalaman aparat dalam menangani persoalan-persoalan yang dihadapi Sub Dinas Pengairan.

d. Aspek Akuntabilitas.

Diukur dengan:

d.1 Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah kerja Sub Dinas Pengairan.

d.2 Pemantauan pelaksanaan program pengembangan dan pemeliharaan di wilayah kerja Sub Dinas Pengairan.

d.3 Evaluasi kegiatan sub dinas pengairan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja Sub Dinas Pengairan

3) Sengketa.

Indikator terjadinya konflik antara petani dengan PDAM dapat diketahui dengan:

a. Munculnya rasa ketidakpuasan petani terhadap PDAM yang berkaitan dengan pengambilan air

b. Petani didampingi Forum Komunikasi Keluarga Petani menanyakan alasan yang dipakai PDAM dalam melakukan

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran Sub Dinas Pengairan dinas pekerjaan umum kabupaten Klaten berusaha menyelesaikan permasalahan yang muncul diantara PDAM dan petani

2. Tujuan dokumentasi

Untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang tugas dan fungsi dari Sub Dinas Pengairan

3. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang bagaimana peran Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten dapat memberikan manfaat.

- a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pemerintahan khususnya.
- b. Memberikan masukan dan saran ke Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten dalam menyelesaikan sengketa air antara PDAM dengan petani.
- c. Memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu petani dan PDAM
- d. Mengetahui sejauh mana peran Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten dalam berusaha menyelesaikan sengketa air

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Oleh karena itu penelitian ini hanya untuk memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan masalah yang dianalisa secara kualitatif.

Adapun ciri-ciri dari metode deskriptif menurut Winarno Surachmad sebagai berikut :

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang yaitu pada masalah aktual.
2. Data yang dikumpulkan mula mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa¹⁷

2. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis dari obyek penelitian sehingga dapat diperoleh data-data yang diperlukan.¹⁸

¹⁷ Winarno surachmad, *Paper, Skripsi, tesis Disertasi*, CV Tarsito, Bandung, 1971, hal 1940

¹⁸ *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 1994, hal 126

Dengan teknik observasi peneliti dapat mengamati cara kerja Sub Dinas Pengairan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi PDAM dengan petani, serta mencatat kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian.

b. Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengambilan data dengan cara mewawancarai secara langsung dan lisan kepada responden. Secara langsung pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan cara ini peneliti berusaha untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya.

Untuk itu responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

1. Aparat Sub Dinas Pengairan DPU Kabupaten Klaten
2. Petani Di Daerah Klaten Selatan

Dengan demikian diharapkan agar responden yang akan diwawancarai tersebut diatas dapat memberikan informasi sesuai keadaan yang dihadapi. Maka pada taraf tertentu berdasarkan kajian

.....

c. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai responden secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan dimana dalam setiap pertanyaan disediakan jawaban yang dianggap sesuai dan benar menurut responden.

Suatu kuesioner disebut kuesioner langsung jika pertanyaan dimaksudkan untuk mengetahui pendapat, keyakinan atau keadaan diri responden yang bersangkutan. Sebaliknya jika daftar pertanyaan dimaksudkan untuk mengetahui tentang keadaan orang lain di luar diri responden disebut kuesioner tidak langsung.¹⁹

Dalam hubungannya dengan jawaban responden terhadap kuesioner yang diajukan, maka kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Kuesioner terbuka

Yaitu daftar pertanyaan dimana jawaban dan cara pengungkapannya bermacam-macam, sehingga responden dapat memberikan jawaban secara bebas

2) Kuesioner terstruktur

Yaitu daftar pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik kuesioner berstruktur.

d. Teknik Dokumentasi

Data dokumentasi biasanya digunakan dalam ilmu sejarah, akan tetapi dokumentasi dipakai sebagai sumber data yang dipakai bagi setiap penelitian. Sehubungan dengan itu Sartono Kartodirojo mengemukakan bahwasanya data yang terdapat dalam dokumentasi, tidaklah secara khusus tersedia bagi penelitian sejarah saja, tetapi secara leluasa dapat digunakan dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya, akan tetapi bila masyarakat sebagai gejala mempunyai dimensi temporal.²⁰

Teknik dokumentasi juga digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, arsip-arsip dan dokumen-dokumen maupun gambar monografi yang ada di lokasi penelitian. Data sekunder ini diharapkan sebagai bahan pelengkap dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

e. Populasi dan Sampel

(1) Populasi.

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit yang dianalisis yang ciri-cirinya akan diduga atau skala individu yang ada di daerah penelitian. Populasi petani yang ada di Kecamatan Klaten Selatan

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta 1989, hal 44

semuanya adalah 2498 orang yang tersebar di sebelas desa dan satu Kelurahan.

(2) Sampel

Sampel adalah sebagian individu dari populasi yang akan di selidiki atau dengan kata lain sampel dari jumlah keseluruhan populasi. Dalam teknik pengambilan sampel responden diwawancarai dan diberi kuesioner dengan menggunakan metode secara acak.

Ida Bagus Mantara menyatakan :

“Besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10 % dan ada pula penelitian lain yang menyatakan bahwa jumlah sampel minimal 5 % dari jumlah elementer populasi”.

Dari kedua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dan jelas mengenai besar kecilnya sampel yang harus diambil dari suatu populasi dalam penelitian ini. Apabila penyusun mendasarkan pada pendapat Ida Bagus Mantara maka populasi yang diambil minimal adalah 5 %, maka jmlah sampel 40 orang sebagai responden dirasa sudah cukup untuk mewakili populasi yang berjumlah 603 orang dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan dari jumlah petani secara keseluruhan di Kecamatan Klaten Selatan yang berjumlah 2498 orang tidak semuanya mengalami sengketa air dengan PDAM, tetapi hanya 3 desa saja yang selama ini ada sengketa air dengan PDAM yaitu Desa Kajoran, Karanglo dan Gayamprit

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data autentik atau data langsung dari tangan pertama yang menyangkut pendapat dari responden tentang variabel penelitian, yang bisa diperoleh dari jawaban hasil interview atau observasi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Melihat dari uraian ini, maka yang akan dijadikan data sekunder dari penelitian ini adalah arsip-arsip, buku, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan variabel penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Merupakan analisa kualitatif yaitu ada dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilaku yang nyata dan dituangkan sebagai suatu yang utuh dan analisa deskriptif yaitu segala data-data hasil penelitian dijabarkan sehingga menjadi suatu gambaran permasalahan yang ada.²¹

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, PDAM dan Petani di Kecamatan Klaten Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan kasus

²¹ Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kuantitatif Rake Sarasin 1984

sengketa air antara PDAM dengan Petani melibatkan hal-hal dasar yaitu masalah air yang bagi keduanya merupakan hal atau sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bagi PDAM air merupakan bahan baku utama dan merupakan komoditas utama yang dijual PDAM kepada masyarakat selaku konsumen. Sedangkan bagi petani air adalah sarana penting dalam kegiatan bercocok tanam, karena tanpa adanya air maka lahan-lahan yang ada menjadi kurang